

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Penulis memilih judul "*Upaya Oxfam dalam mengurangi kesenjangan gender di Papua*" sebagai judul skripsi berdasarkan beberapa alasan. Pertama, penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam Oxfam sebagai lembaga Internasional. Oxfam merupakan salah satu *Non-Government Organization* (NGOs) yang sangat aktif dalam membantu negara-negara berkembang atau negara dunia ketiga. Oxfam merupakan cabang dari *Famine Relief Committee* yang berkedudukan di Oxfröd, Inggris. Awal pembentukannya bernama *The Oxford Famine Relief Committee*, dengan tujuan berdedikasi untuk memerangi kemiskinan dan ketidakadilan di seluruh dunia.

Kedua, terhadap partisipasi dan program yang dilakukan Oxfam terhadap masyarakat Indonesia, terutama dalam pemberdayaan kaum perempuan. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, di mana kaum perempuan masih menjadi *second people*. Hal ini terlihat masih banyak diskriminasi yang dialami oleh perempuan Indonesia, terutama perempuan di wilayah bagian Timur Indonesia, Papua salah satunya. Konflik, bencana alam serta sistem adat budaya yang masih sangat patriarki membuat kaum perempuan Papua masih sulit untuk mendapatkan serta

mengakses hak-hak mereka. Dari berbagai kondisi yang terjadi di Papua, sehingga memunculkan banyak permasalahan yang dihadapi kaum perempuan Papua.

Dengan serangkaian problematika yang terjadi, hadirnya Oxfam sebagai salah satu lembaga internasional memberikan harapan baru bagi perempuan khususnya. Kehadiran Oxfam di Papua dan bekerjasama mitra lokal dan pemerintah untuk memberikan solusi dan perubahan kearah yang lebih baik terhadap perempuan Papua, guna meningkatkan peranan dan partisipasi kaum perempuan di dalam masyarakat.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian skripsi ini memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui tentang latar belakang yang mendorong terbentuk Oxfam sebagai lembaga *Non-Government Organizations* (NGOs) internasional.
2. Untuk mengkaji lebih dalam sisi positif Oxfam dalam meningkatkan peranan kaum perempuan di wilayah Papua.
3. Memperluas dan memperdalam pengetahuan penulis mengenai teori-teori dan metodologi dalam studi hubungan internasional, terutama yang berhubungan dengan upaya Oxfam dalam mengurangi kesenjangan gender masyarakat Papua.
4. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana S1 pada jurusan Ilmu

C. Latar Belakang Permasalahan

Persoalan perempuan selalu menjadi isu menarik untuk dikaji, baik dalam tataran nasional maupun internasional. Persoalan ini dapat kita lihat dengan tingginya permasalahan yang dihadapi oleh kaum perempuan seperti: kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pemerkosaan, pelecehan seksual, *human trafficking*, isu gender dan isu lain. Sebagai salah satu lembaga internasional, *United Nations Women* (UN-Women) menempatkan isu diskriminasi terhadap kaum perempuan, pemberdayaan perempuan, persamaan gender dan permasalahan keamanan sebagai *concern*-nya dan menjadikannya sebagai isu global.¹ Ini menunjukkan bahwa perempuan merupakan makhluk yang sangat lemah dan rentan akan problematika dalam tatanan kehidupan.

Salah satu negara yang masih menghadapi berbagai problematika terhadap kaum perempuan adalah Indonesia. Sebagai negara yang memiliki keanekaragaman etnis dan sistem budaya yang berbeda dalam setiap lapisan masyarakat, menyebabkan semakin kompleksnya permasalahan kaum perempuan Indonesia. Kondisi ini terlihat dari permasalahan yang dihadapi kaum perempuan Indonesia terus terjadi dari tahun ketahun. Komisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan (komnas perempuan) mencatat, bahwa sepanjang tahun 2011 kasus terhadap perempuan seperti: kekerasan dalam

rumah tangga (KDRT), kasus di ranah publik dan kasus yang terjadi di ranah negara masih terus meningkat.²

Kasus-kasus di ranah publik termasuk teror kekerasan seksual di angkutan umum, kekerasan terhadap perempuan pekerja migran, kelompok yang berbeda orientasi seksual dan ekspresi gendernya, buruh dan juga terkait konflik sumber daya alam. Belum lagi persoalan pelanggaran HAM masa lalu yang tak kunjung sampai penyelesaiannya, ini membuat kaum perempuan semakin termarginalkan.

Bukan hanya itu, Komisi Anti Kekerasan terhadap perempuan mencatat pada tahun 2012, bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan juga dilakukan oleh aparat keamanan. Kekerasan yang dilakukan terlihat dalam hal pembubaran aksi damai, seperti di Sape (Bima) dan Ogan Ilir (Sumatera Selatan).³ Dalam aksi ini perempuan berhadapan dengan kekerasan secara langsung maupun menjadi penanggung beban dari akibat yang ditimbulkan oleh kekerasan tersebut. Situasi serupa juga dihadapi kaum perempuan anggota komunitas minoritas yang menjadi target penyerangan dan tindak intoleransi lainnya yang dilakukan oleh kelompok di dalam masyarakat dengan mengatasnamakan agama. Semua situasi ini menjauhkan kaum perempuan Indonesia untuk dapat menikmati kemerdekaan dan hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara.

²Lihat *Kemerdekaan yang tertunda: perempuan Indonesia belum menikmati hak konstitusional atas rasa aman* (diakses pada 27 Juli 2013); dikutip dari <http://www.komnasperempuan.or.id/2012/08/kemerdekaan-yang-tertunda-perempuan-indonesia-belum-menikmati-hak-konstitusional-atas-rasa-aman/>.

³Lihat *Kemerdekaan yang Tertunda*, *Ibid* (diakses pada 27 Juli 2013)

Papua merupakan salah satu wilayah Indonesia bagian Timur yang masih mengalami banyak problematika di dalam masyarakat, terutama kaum perempuan. Permasalahan terjadi dikarenakan wilayah Papua masih sangat rentan akan konflik serta adat dan sistem budaya masyarakat setempat yang masih sangat kuat. Ini terlihat dari keterbatasan yang dimiliki kaum perempuan Papua dalam melakukan perannya di dalam bermasyarakat. Pasang surutnya konflik yang terus terjadinya di ranah Papua berdampak langsung pada semua anggota masyarakat, tidak terkecuali kaum perempuan. Salah satu dampak yang dialami perempuan Papua yaitu, masih banyak kekerasan yang dilakukan oleh negara terhadap perempuan. Kekerasan negara, yaitu semua bentuk kekerasan terhadap perempuan baik kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau didukung aparaturnya negara dan aparat pemerintah.⁴

Bukan hanya kekerasan oleh negara, perempuan Papua juga mengalami kekerasan dalam bidang domestik, yaitu kekerasan yang dialami dalam rumah tangga seperti: poligami dan selingkuh yang dilakukan oleh kaum laki-laki, penelantaran ekonomi, kekerasan non-fisik seperti penganiayaan dan lain-lain, kekerasan psikis, pemerkosaan dalam perkawinan, serta pemerkosaan terhadap anak perempuan.⁵ Dalam bidang kesehatan sendiri, perempuan masih banyak mengalami permasalahan seperti: ketahanan pangan dan gizi buruk yang cukup tinggi, angka kematian Ibu dan

⁴Lihat Hasil kerjasama Komnas Perempuan, Pokja Perempuan Majelis Rakyat Papua dan Internasional Center for Transitional Justice (ICTJ) Indonesia serta didukung oleh HIVOS dan Swiss Embassy dalam Pendokumentasian Bersama Kelompok Kerja Pendokumentasian Kekerasan dan Pelanggaran HAM Perempuan Papua 2009-2010. *Stop Sudek! Kerahasiaan Perempuan Papua*. Yogyakarta: Kencana, 2010.

bayi, dan angka kelahiran yang cukup tinggi serta tingginya tingkat penularan HIV.⁶ Kondisi ini semakin memperburuk keadaan kaum perempuan, sehingga perempuan semakin termarginalkan.

Selain kesehatan, pendidikan juga menjadi problematika tersendiri yang dihadapi kaum perempuan, yaitu masih rendahnya tingkat pendidikan terutama bagi perempuan yang berdomisili di wilayah pedalaman. Permasalahan ekonomi juga menjadikan faktor yang ikut berperan dalam membuat kaum perempuan Papua terbelakang dan hidup dalam kemiskinan. Tingginya angka kemiskinan di Papua, sehingga perempuan Papua bertanggung jawab atas pekerjaan reproduktif dan produktif baik secara langsung maupun tidak langsung dan mendukung suami dalam peran-peran sosial di dalam masyarakat.⁷

Berangkat dari banyaknya persoalan yang dialami perempuan Papua, maka banyak aktor non-pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan yang terjadi. *Non-Government Organizatios* (NGOs) merupakan salah satu aktor lembaga sosial yang ikut berperan dan memberikan kontribusi dalam menyelesaikan permasalahan perempuan di ranah Papua. Kehadiran NGOs sangat berperan aktif dalam memberikan bantuan dan solusi terhadap masalah-masalah yang terjadi di Papua. Kehadiran NGOs seperti: *World Vision International*, *Hivos*, *Plan International* dan *Mercy Corps* sebagai *agent of change*, memberikan arah yang

⁶Lihat *United Nations in Indonesia* (diakses pada 31 Juli 2013); dikutip dari <http://www.un.or.id/id/dimana-kami-bekerja/fokus-geografis/papua>.

⁷Lihat Wigati Yektingtyas-Modouw: *Helachili dan Ehabla fungsinya dan peran perempuan dalam Masyarakat Sentari Papua* (A digital Karya Nara: Yogyakarta, 2009) hal. 182

positif terhadap masyarakat. Dari sekian banyak NGOs yang berkontribusi di Papua, Oxfam merupakan salah satu lembaga yang paling aktif dalam memberikan kontribusi terhadap problematika yang terjadi di Papua.

Sejarah kehadiran Oxfam di mulai saat Perang Dunia II, tepatnya pada bulan April tahun 1941⁸. Oxfam merupakan lembaga yang berdedikasi untuk memerangi kemiskinan dan ketidakadilan di seluruh dunia. Di Indonesia, Oxfam bekerja sejak tahun 1957 dan bekerja bersama mitra baik dari sektor pemerintah maupun non-pemerintah serta komunitas lokal guna memerangi kemiskinan.⁹

Untuk wilayah Papua sendiri, Oxfam melakukan banyak program guna membantu masyarakat Papua seperti: program *livelihood* dalam peningkatan ekonomi masyarakat Papua dan salah satu program yang mendapat perhatian khusus Oxfam adalah pemberdayaan perempuan (*Women Empowerment*) serta isu kesetaraan gender menjadi fokus utama. Program ini bertujuan untuk mempromosikan hak-hak perempuan yang di mulai sejak 2009 sampai tahun 2013.

Penting untuk disimak, bahwa peran dan upaya Oxfam dalam menyelesaikan problematika terhadap gender di Papua telah banyak memberikan perubahan yang sangat berarti dan memberikan harapan baru bagi masyarakat Papua, khususnya kaum perempuan sendiri. Perubahan-perubahan yang telah Oxfam berikan kepada masyarakat Papua sangat menarik untuk dibahas, untuk itu di dalam skripsi ini

⁸Lihat *History of oxfam internasional* (diakses pada 31 Juli 2013); dikutip dari <http://www.oxfam.org/en/about/history>.

⁹Lihat *Oxfam in Indonesia* (diakses pada 31 Juli 2013); dikutip dalam www.oxfam.org.uk/what-we-do/countries-we-work-in/Indonesia.

penulis berupaya untuk mengkaji lebih dalam tentang *“Upaya Oxfam dalam mengurangi kesenjangan gender di Papua”*

D. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas dan untuk mempermudah penganalisaan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana upaya Oxfam sebagai NGOs Internasional dalam mengurangi kesenjangan gender di Papua?

E. Kerangka Pemikiran

Untuk memahami suatu fenomena serta menjawab pokok permasalahan yang ada, maka diperlukan kerangka dasar pemikiran berupa teori untuk menganalisa permasalahan tersebut. Oleh karena itu, dalam menganalisa dan mendeskripsikan jawaban dari masalah bagaimana upaya Oxfam dalam mengurangi kesenjangan gender di Papua, maka penulis menggunakan teori Modernisasi.

1. Teori Modernisasi.

Dalam kajian ilmu hubungan internasional dan pembangunan, teori modernisasi merupakan kajian yang sering dipakai dalam melihat berbagai tingkat permasalahan yang muncul khususnya pembangunan di kawasan dunia ketiga. Teori modernisasi lahir pada pasca Perang Dunia Kedua, yaitu pada saat Amerika kehilangan lawan dagang, sehingga terjadi kejenuhan dalam negeri. Dari keterlibatan Amerika inilah negara-negara Eropa yang porak poranda sesuai perang mulai bangkit dari keterpurukannya. Keterlibatan

Amerika bukan hanya “menolong” negara-negara Eropa, tetapi di balik itu justru banyak memberikan keuntungan untuk pihak Amerika sendiri.¹⁰

Pada perkembangannya kemudian, keberhasilan pembangunan yang diterapkan pada negara-negara di kawasan Eropa ini memberikan pemikiran lanjut untuk melakukan ekspansi pasar ke negara-negara Dunia Ketiga dan banyak memberikan bantuan, terutama dalam hal pembangunan. Keberhasilan yang diterapkan di kawasan Eropa ternyata berbanding terbalik, di mana banyak negara-negara Dunia Ketiga mengalami kegagalan terutama dalam bidang pembangunan. Penjelasan tentang kegagalan ini memberikan inspirasi terhadap sarjana-sarjana sosial Amerika, yang kemudian dikelompokkan dalam teori besar, dan di kenal sebagai teori modernisasi.¹¹

Dalam melihat berbagai permasalahan yang terjadi di Indonesia, baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia (SDM) masih mengalami berbagai kendala, terutama di wilayah Indonesia bagian Timur, yaitu Papua. Permasalahan yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor dari dalam (*internal*) ataupun faktor dari luar (*eksternal*). Untuk membantu permasalahan yang terjadi, sebagaimana dikutip dalam data primer,¹² menurut pandangan kaum modernis di dalam teori pembangunan ada dua pendekatan yang kerap digunakan untuk membantu

¹⁰Lihat Syarif Moeis, dikutip dalam makalah *Pembangunan masyarakat Indonesia menurut pendekatan teori modernisasi dan teori dependensia* (FPIPS UPI Bandung: 2009).
¹¹Lihat Syarif Moeis. *Ibid.*

permasalahan yang terjadi di negara dunia ketiga, terutama terhadap permasalahan yang terjadi di wilayah Papua. Kaum modernis menggunakan pendekatan melalui aspek internal (*indigenous aspects*) dan aspek eksternal (*exogenous aspects*).

a) Aspek Internal (*Indigenous Aspects*)

Menurut pandangan kaum modernis, aspek dari dalam (*internal*) merupakan variable utama dalam menjelaskan proses pembangunan. Dalam pandangannya, kaum modernis menekankan bahwa terjadinya keterbelakangan dan pembangunan dalam sebuah negara dipengaruhi oleh aspek internal (*indigenous aspects*).¹³ Aspek internal (*indigenous aspects*) merupakan aspek yang terdapat dari dalam sebuah negara atau wilayah sebuah negara seperti nilai-nilai budaya, agama, ideologi serta aspek pendukung lainnya yang ada dalam sebuah negara atau masyarakat. Aspek inilah yang memiliki pengaruh yang sangat besar sebagai penghambat atau pelaku jalannya sebuah pembangunan.

Ekonomi yang stabil dalam sebuah negara atau wilayah merupakan salah satu faktor pendukung untuk mencapai sebuah keberhasilan dalam proses pembangunan. Sebagai seorang ahli dalam bidang ekonomi, W.W. Rostow "pertumbuhan ekonomi" membagi proses pembangunan menjadi

landas, (3) lepas landas, (4) bergerak ke kedewasaan, (5) zaman konsumsi massal yang tinggi.¹⁴

Dalam hal ini Rostow menekankan kondisi ketiga yaitu lepas landas merupakan kondisi non-ekonomi yang sangat penting dalam melakukan proses pembangunan. Menurut Rostow:

Kondisi ketiga menunjukkan kepada kesanggupan yang cukup (dari lembaga-lembaga ini) untuk mengumpulkan modal dari sumber-sumber dalam negeri....prakondisi untuk lepas landas memerlukan kesanggupan awal untuk menggerakkan tabungan dalam negeri secara produktif, dan juga menciptakan sebuah struktur yang memungkinkan tingkat tabungan yang cukup tinggi.¹⁵

Dalam tahap ini, Rostow lebih menekan adanya peran negara sebagai aktor untuk melakukan perubahan, seperti melakukan investasi yang dilakukan dengan menanamkan modal guna menunjang pertumbuhan ekonomi sebuah wilayah dan peran lembaga untuk menjadi penerak dalam proses pembangunan.

Bukan hanya lembaga-lembaga yang menjadi faktor utama dalam melakukan proses pembangunan. Tetapi, menurut Bert F. Hoselitz faktor lingkungan mempunyai peranan yang sangat penting dalam keberhasilan sebuah pembangunan. Menurut Hoselitz, dengan kondisi lingkungan yang produktif, maka akan menciptakan lembaga-lembaga yang kongret pula. Hoselitz mengatakan:

¹⁴Lihat Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), hal 25-28.

¹⁵Lihat Arief Budimana, *Ibid* hal 30.

Kondisi lingkungan ini harus dicari terutama dalam aspek-aspek non-ekonomi dari masyarakat. Dengan kata lain, lepas landas dari pengembangan modal seperti pembangunan sarana sistem telekomunikasi serta transportasi dan investasi dalam fasilitas pelabuhan, pergudangan, dan instalasi-instalasi sejenis untuk perdagangan luar negeri, banyak dari pembaruan-pembaruan yang terjadi pada periode persiapannya didasarkan pada perubahan-perubahan pengaturan kelembagaan yang terjadi dalam bidang hukum, pendidikan, keluarga dan motivasi.¹⁶

Berdasarkan penjabaran teori di atas, maka jika melihat pada kondisi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat Papua, terutama kaum perempuan, maka faktor internal baik ekonomi maupun lingkungan masyarakat merupakan tahap awal yang harus dibenahi untuk menuju tahap berikutnya. Dalam artian terciptanya lingkungan yang kondusif dan dinamis serta pembenahan yang tepat sasaran, yaitu pembangunan dari segi infrastruktur seperti pembangunan jembatan, sarana komunikasi yang baik, alat transportasi yang memadai serta pembangunan sarana lainnya yang menjadi faktor pendukung pembangunan. Faktor utama lainnya yaitu menciptakan lingkungan yang dapat memberi motivasi kepada masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, guna membentuk manusia modern yang dapat membangun.

Faktor inilah yang tidak dapat dimiliki oleh masyarakat Papua seutuhnya, terutama kaum perempuan asli Papua. Konflik yang sangat rentan, bencana alam serta adat patriarki yang sangat kuat, membuat perempuan Papua memiliki posisi dan peran yang sangat terbatas di dalam masyarakat dengan kondisi yang ada. Banyak munculnya permasalahan-

pemasalahan baru di dalam masyarakat Papua. Kemiskinan merupakan salah satu dari serangkaian permasalahan yang dihadapi masyarakat Papua setiap harinya. Kemiskinan membuat masyarakat Papua harus bekerja keras, terutama kaum perempuan yang banyak menghabiskan waktu di perkebunan guna memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Bukan hanya itu, dalam bidang pendidikan perempuan Papua juga masih tertinggal, ini terlihat dengan tingginya buta aksara yang di dominasi oleh kaum perempuan, terutama perempuan asli Papua. Dalam bidang kesehatan pun perempuan Papua tak luput dari permasalahan. Kekurangan gizi, tingginya angka kematian ibu dan anak serta tingkat HIV/AIDS yang tinggi menjadi permasalahan yang terus terjadi wilayah Papua. Terciptanya kondisi lingkungan yang dinamis merupakan harapan penduduk Papua, terutama harapan bagi kaum perempuan.

b) Aspek Eksternal (*Exogenous Aspect*)

Bukan hanya dari segi internal, pandangan kaum struktural melihat bahwa faktor eksternal (*exogenous aspects*) merupakan variable penting dalam menjalankan dan menjelaskan pembangunan, baik yang dilakukan oleh negara maupun lembaga sosial. Kaum struktural menekankan bahwa keterbelakangan dan pembangunan sebuah negara dapat dipengaruhi oleh aspek eksternal (*exogenous aspects*). Aspek eksternal merupakan aspek

atau faktor yang berasal dari luar, seperti campur tangan pihak asing atau bantuan dari lembaga luar.

Teori struktural sebenarnya merupakan teori-teori yang memakai pendekatan secara struktural. Di dalam teorinya, pendekatan struktural menjelaskan bahwa:

Menekankan lingkungan material manusia, yaitu organisasi kemasyarakatan beserta sistem imbalan-imbalan material yang diberikannya, perubahan-perubahan pada lingkungan material manusia termasuk perubahan-perubahan teknologi. Lingkungan material ini dianggap sebagai faktor yang lebih penting daripada keadaan psikologi dan nilai-nilai kemasyarakatan yang ada dalam mempengaruhi tingkah laku manusia.¹⁷

Menurut pandangan kaum struktural, lingkungan material yaitu berupa organisasi kemasyarakatan dan sistem yang berlaku merupakan faktor penting dalam melakukan perubahan-perubahan pada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua permasalahan dan pembangunan dapat diselesaikan oleh faktor internal (negara). Tetapi lembaga kemasyarakatan juga bisa menjadi aktor yang memiliki pengaruh dalam menyelesaikan permasalahan serta membantu proses pembangunan.

Kaum struktural memberikan beberapa pandangan umum terhadap kaum modernis dalam proses pembangunan melalui pendekatan struktural fungsional. Kaum struktural menyatakan bahwa: (1) Mengkombinasikan naturalisme dan rasionalisme (2) Memandang sistem sosial sebagai

kesatuan fungsi yang saling menunjang (3) Perubahan adalah upaya mengeliminasi disfungsi sosial.¹⁸

Dalam poin kedua terlihat bahwa, kaum struktural memandang sistem sosial seperti organisasi kemasyarakatan memiliki fungsi yang saling menunjang atau mendukung antara masyarakat dan lembaga sosial, yang memiliki tujuan untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik. Jika melihat pada permasalahan yang dihadapi kaum perempuan di Papua, hadirnya bantuan asing berupa lembaga internasional yang dikenal sebagai *Non-Government Organizations* (NGOs) dapat menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah untuk memulai perubahan dan perbaikan. Menurut Kamus Hubungan Internasional, *Non-Government Organizations* (NGOs) merupakan suatu organisasi internasional privat yang berfungsi sebagai mekanisme bagi kerjasama di antara kelompok swasta nasional dalam ihkwal urusan internasional, terutama dalam bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, humaniora, dan teknis.¹⁹

Keterlibatan *Non-Government Organizations* (NGOs) di Papua, memiliki peran yang sangat dominan dalam melakukan dan membantu proses pembangunan masyarakat Papua seperti dalam bidang ekonomi dan sosial. Untuk mengenal lebih lanjut dan bagaimana perkembangan NGOs,

¹⁸Lihat Adde M Wirasanjaya, *Beberapa pendekatan dalam pembangunan*. Kuliah teori pembangunan. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 21 Maret 2013.

¹⁹Lihat Leah C. Blom dan Ben O'Keefe, *Kamus Hubungan Internasional* (Bandung: Pustaka Baru, 2007).

secara umum John Clark membagi kedalam enam aliran pemikiran, antara lain: Pertama *Agen Penyantunan dan Kesejahteraan*, yang bekerja dalam bidang pemulihan dan kesejahteraan. Kedua *Organisasi Pengembangan Teknologi*, merupakan NGOs yang melaksanakan programnya sendiri untuk memelopori pendekatan baru atau memperbaiki pendekatan-pendekatan yang sudah ada. Ketiga *Kontraktor Pelayanan Umum*, NGO yang sebagian besar didanai pemerintah Utara dan yang bekerjasama dengan pemerintah Selatan dan agen pemberi bantuan resmi. Keempat *Agen pengembangan Masyarakat*, merupakan NGO Utara dan mitra penghubung di Selatan yang menaruh perhatian pada kemandirian, pembangunan sosial dan demokrasi masyarakat lapisan bawah. Kelima *Organisasi Pengembangan Masyarakat Bawah*, merupakan NGO Selatan yang anggotanya adalah orang miskin dan tertindas dan berupaya membentuk satu proses pembangunan masyarakat. Keenam atau yang terakhir adalah *Kelompok Jaringan Advokasi*, merupakan organisasi yang tergabung dalam aliran ini tidak memiliki proyek, tetapi keberadaan organisasi untuk melakukan pendidikan dan lobi.²⁰

Kehadiran Oxfam di Papua sebagai agen pengembangan masyarakat, hal ini memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi masyarakat Papua, terutama terhadap perempuan asli Papua terkait dengan permasalahan

²⁰ Lihat John Clark, *NGO dan Pembangunan Desa*, Jakarta (M. L. J. PT. Tiara), 1995, hal. 10.

kemiskinan dan permasalahan sosial serta permasalahan gender yang terjadi selama ini. Untuk memahami kontribusi Oxfam lebih lanjut sebagai NGOs, kita harus melihat pada pendekatan yang digunakan oleh NGOs dalam membantu proses pembangunan. Sebagaimana diungkapkan dalam penelitian,²¹ Elliot membedakannya ke dalam tiga pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan kesejahteraan: memfokuskan pada aktivitas pengumpulan dana dan menyediakan jasa pada kelompok tertentu (seperti bantuan untuk anak-anak dan pemulihan kelaparan).
2. Pendekatan pembangunan: programnya menekankan pada bantuan proyek pembangunan dengan tujuan meningkatkan kapasitas suatu komunitas untuk menyediakan kebutuhan dasar sendirinya.
3. Pendekatan pemberdayaan: melihat kemiskinan sebagai hasil proses politik, sehingga kegiatannya berfokus pada memasukan (atau melatih) masyarakat ke dalam proses tertentu

Dari tiga pendekatan di atas, pendekatan pemberdayaan merupakan pendekatan yang digunakan Oxfam untuk membantu masyarakat Papua, terutama terhadap kondisi perempuan di Papua. Pendekatan ini terkait dengan misi yang dibawa Oxfam, yaitu melakukan perubahan yang lebih baik, baik dalam hal hak asasi manusia, keadilan, kemiskinan serta kesenjangan yang ada di dalam masyarakat Papua. Program *Women's Empowerment* merupakan salah satu pendekatan pemberdayaan yang dilakukan Oxfam di Papua terhadap kaum perempuan Papua. Program pemberdayaan merupakan bagian dari mempromosikan kesetaraan gender yang dilakukan Oxfam di Papua, terutama terhadap masyarakat dan perempuan asli Papua. Dalam mencapai tujuannya, Oxfam bekerjasama

dengan lembaga terkait seperti pemerintah, masyarakat dan lembaga lokal sebagai mitra. Untuk mewujudkannya, Oxfam bersama mitra melakukan kegiatan seperti: pendampingan terhadap perempuan untuk melakukan perubahan dan meningkatkan kesetaraan gender serta peranan kaum perempuan, dengan tujuan mengelola potensi sumber daya agar masyarakat keluar dari kemiskinan guna tercipta kesejahteraan dan pembangunan yang adil.

F. Hipotesa

Upaya Oxfam sebagai NGOs Internasional dalam mengurangi kesenjangan gender di Papua, yaitu mengubah perspektif masyarakat Papua, khususnya kaum perempuan terhadap peran yang dilakukan selama ini melalui:

Pertama, melakukan pemberdayaan secara internal, yaitu melalui penanaman nilai-nilai modern serta kesadaran gender terhadap masyarakat dan kaum perempuan dalam bentuk pemberian pelatihan. Hal ini bertujuan agar perempuan Papua memiliki pengetahuan pentingnya kesetaraan gender serta keterampilan, sehingga terbebas dari masalah kemiskinan dan keterbelakangan.

Kedua, melalui program *Papuan Women Empowerment (PAWE)*, Oxfam melakukan pemberdayaan terhadap organisasi-organisasi perempuan, dengan tujuan untuk mengintegrasikan kesetaraan gender, serta ikut melibatkan kaum perempuan di

menghilangkan nilai-nilai budaya serta norma wilayah setempat. Sehingga perempuan dan laki-laki memperoleh kesempatan dan peluang yang sama untuk berpartisipasi aktif di dalam masyarakat.

G. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian merupakan suatu upaya untuk menghindari penulisan yang terlalu melebar, sehingga mengaburkan pokok permasalahan yang telah direncanakan. Oleh karena itu, diperlukan batasan masalah yang menjadi ruang lingkup penulisan ini. Untuk membatasi cakupan penelitian upaya Oxfam dalam mengurangi kesenjangan gender di Papua, maka dari itu penulis akhirnya membatasi jangkauan penelitian dimulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013.

H. Metodologi Penelitian

Metode penelitian ini meliputi jenis penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

a) Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu analisis permasalahan berdasarkan data-data yang dikaji atas dasar realitas data yang diperoleh, dipaparkan secara naratif dan deskriptif.

b) Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode *library research* (studi pustaka), data diperoleh dari buku, data dari lembaga terkait, jurnal

media massa, baik itu media elektronik maupun cetak yang sesuai dan relevan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini.

c) Teknik Analisis Data

Analisis data diperlukan untuk mengolah data yang diperoleh yang nantinya akan memberikan arti dan makna yang berguna dalam menjawab rumusan masalah. Dalam penelitian ini, pekerjaan analisis lebih kepada upaya mengorganisasikan temuan data, kemudian mengkonstruksikan temuan tersebut dalam bingkai kerangka pemikiran yang telah dibuat.

Dari analisis tersebut akan diperoleh jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan untuk kemudian dijadikan sebagai dasar dalam menentukan kesimpulan penelitian.

I. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab. Pembahasan terperinci dalam masing-masing bab akan dijelaskan dalam sub-sub bab. Setiap bab dalam pembahasannya memiliki saling keterhubungan guna membentuk suatu karya ilmiah yang sistematis.

Bab pertama yaitu pendahuluan. Pada bab ini merupakan bab pengantar yang berisi tentang alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, tujuan penelitian, rumusan

Bab kedua membahas lebih spesifik tentang latar belakang kebangkitan Oxfam sebagai NGOs Internasional dan keterlibatan Oxfam dalam pembangunan serta pemberdayaan di Indonesia.

Bab ketiga akan dibahas bagaimana pembangunan dan permasalahan di Papua yang meliputi gambaran umum pembangunan di Papua, peran perempuan dalam pembangunan dan kesenjangan gender di Papua.

Bab keempat membahas uraian atau jawaban terhadap hipotesa yang dideskripsikan dalam bentuk fakta-fakta yang merupakan hasil dari penelitian, yaitu bagaimana upaya Oxfam dalam mengurangi kesenjangan gender di Papua.

Bab kelima berisi kesimpulan dari semua materi penulisan penelitian yang dirangkum mengenai upaya Oxfam sebagai NGOs dalam mengurangi kesenjangan gender di Papua.